

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET PASCA BENCANA TSUNAMI DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Juan Rivaldi Onsent

NPP. 29.1450

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: valdi.onsent09@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This thesis is entitled "Local Government Management in Asset Management Post-Tsunami Disaster in Palu City, Central Sulawesi Province". **Purpose:** The purpose of writing this thesis is to identify and analyze local government management in asset management after the tsunami disaster in Palu City, Central Sulawesi Province, to identify and analyze the supporting and inhibiting factors of local government management in asset management after the tsunami disaster in Palu City, Central Sulawesi Province. , to find out and analyze efforts to overcome the inhibiting factors of local government management in asset management after the tsunami disaster in Palu City, Central Sulawesi Province. **Methods:** The theory used in measuring management is George R. Terry's theory in the basics of management revised edition (2019:8) namely planning (planning), organizing (organizing), implementation (actuating), supervision (controlling). The research design used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The informants in this study were the Mayor of Palu, Chairman of the DPRD, Regional Secretary of Palu City, Regional Assistant of Palu City, Head of Palu City BPKAD, Secretary of Palu City BPKAD, Head of Sub-General and Personnel of Palu City BPKAD, Head of Sub Division of Program and Reporting of BPKAD Palu City. , Head of Assets Division of the Palu City BPKAD, and the community in this case the Palu City BPKAD employees. **Results/Findings:** Based on the results of the study, it can be concluded that the local government management is good in managing assets after the tsunami disaster, although in the process there are obstacles caused by the tsunami disaster and the Covid pandemic. **Conclusion:** There are inhibiting factors that affect Local Government Management in Asset Management such as a lack of training budget/BIMTEK and lack of availability of human resources. Assets such as a lack of training budget/BIMTEK and lack of availability of human resources.

Keywords: Management, Local Government, Assets, Tsunami

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Skripsi ini berjudul “Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah”. **Tujuan:** Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. **Metode:** Teori yang digunakan dalam mengukur manajemen adalah teori George R. Terry dalam dasar-dasar manajemen edisi revisi (2019:8) yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Walikota Palu, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kota Palu, Assisten Daerah Kota Palu, Kepala BPKAD Kota Palu, Sekretaris BPKAD Kota Palu, Kepala Sub Umum dan Kepegawaian BPKAD Kota Palu, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan BPKAD Kota Palu, Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu, serta masyarakat dalam hal ini pegawai BPKAD Kota Palu. **Hasil/Temuan** Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Daerah sudah baik Dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami meskipun dalam prosesnya terdapat kendala yang disebabkan oleh bencana tsunami dan pandemi Covid. **Kesimpulan:** Terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset seperti terdapat kekurangan anggaran pelatihan/BIMTEK dan Kurangnya ketersediaan SDM.

Kata Kunci: Manajemen , Pemerintahan Daerah, Aset, Tsunami

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Kewenangan tersebut diberikan secara profesional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian-pembagian keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan aset negara yang berada di daerah. Sebagai pedoman pengelolaan aset negara, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan BMN/D dengan beberapa aturan teknis, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN, PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Kodifikasi dan Penggolongan BMN, PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, dan PMK Nomor 2/PMK.06/2008 yang diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian BMN, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2006 untuk BMD. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengaman dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan tanganan, penata usahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa :Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah. Terlepas dari banyak atau sedikitnya aset yang perlu dimasukkan dalam neraca daerah, pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan sehingga perlu pengelolaan aset yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan tersebut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam hal pemanfaatan barang milik negara / daerah yaitu dengan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah mendorong penerimaan negara melalui sektor pemanfaatan barang milik negara / daerah. Pengelolaan aset di wilayah Kota Palu itu sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset yang dilakukan pasca bencana tsunami yang terjadi di Kota Palu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Gap Penelitian)

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa :Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Terlepas dari banyak atau sedikitnya aset yang perlu dimasukkan dalam neraca daerah, pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan sehingga perlu pengelolaan aset yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan tersebut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam hal pemanfaatan barang milik negara / daerah yaitu dengan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah mendorong penerimaan negara melalui sektor pemanfaatan barang milik negara / daerah.

Pengelolaan aset di wilayah Kota Palu itu sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam hal ini masih banyak pejabat yang mengambil

keuntungan dalam mengelola aset daerah atau negara yang sedang digunakan dan terdapat beberapa aset yang dalam pemeliharannya kurang diperhatikan seperti fasilitas umum yang berada di jalan atau taman. Hal ini juga berdampak kepada kualitas pengelolaan aset di Kota Palu yang masih kurangnya perhatian terlebih lagi di tempat umum sehingga pengelolaan aset yang bisa menunjang pendapatan daerah tidak dapat dimaksimalkan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan aset maupun konteks lokasi penelitian.

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Graceiella Revine Tadung</p> | <p>Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Dearah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara</p> | <ul style="list-style-type: none"> •Metode kualitatif •Pendekatan induktif •Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi • Teori Pengukuran Kinerja Organisasi (Mahsun dalam Masana Sembiring | <p>Kinerja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terwujudnya Kinerja BPKAD yang baik dalam Menyusun APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang didalamnya dalam pengukurannya ada beberapa item yang mendukung yaitu : Masukan (Input), Proses (Process), Keluaran (Output), Hasil</p> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | (Outcome), Manfaat (Benefit) ,Dampak (Impact) (Graceilla Revine Tadung, 2020) |
| Siska Aprilia Danantyanti | Analisis Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang | <ul style="list-style-type: none"> •Metode kualitatif •Pendekatan induktif •Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi • Kinerja Keuangan, Irhan fahmi | penganggaran dana pemerintah kota Malang yang belum seimbang yang di pengaruhi yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas (Siska Aprilia Danantyanti, 2015) |

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

- a. Perbedaan penelitian dari Graceilla Revine Tadung (Graceilla Revine Tadung, 2020) dengan judul penelitian yaitu Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Dearah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu berfokus pada Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Dearah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sedangkan peneliti membahas Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian, lokus penelitian terdahulu bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, sedangkan lokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palu. Kemudian, penelitian terdahulu menggunakan teori Pengukuran Kinerja Organisasi Mahsun, sedangkan peneliti menggunakan teori manajemen George R. Terry

- b. Perbedaan Penelitian dari Siska Aprilia Danantyanti dengan judul penelitian yaitu, Analisis Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian terdahulu berfokus kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan peneliti mengkaji tentang Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian, lokus penelitian terdahulu bertempat di Badan Pengelola Keuangan Kota Malang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan teori kinerja keuangan Irhan Fahmi, sedangkan peneliti menggunakan teori manajemen George R. Terry

1.5 Tujuan

Mengetahui dan menganalisis manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

II. METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Sumber data yaitu data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subbab ini akan menyajikan hasil penelitian beserta analisisnya. Data yang diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data akan dipaparkan dengan memakai alat analisis berupa teori George R. Terry. Dimensi teori Manajemen George R. Terry meliputi empat dimensi yaitu : perencanaan, (*Planning*), Pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

3.1 Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Pertama yaitu Perencanaan (*Planning*) yang didalamnya terdapat menentukan tujuan: menentukan tujuan di dalam BPKAD Kota Palu sudah teralisasi dengan baik karena sudah menetapkan kebutuhan untuk menunjang manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami. Memformulasikan Kebijakan: bahwa memformulasi kebijakan saat dibutuhkan dalam manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami dan perlu adanya acuan dan kepemimpinan yang baik. Peninjauan: jika terjadi ketidak selarasan antara pegawai maka pekerjaan yang harusnya diperlukan kerjasama akan tidak berjalan dengan lancar. Kedua yaitu Pengorganisasian (*organizing*) yang terdapat didalamnya ialah penentuan dan Penelitian: Adanya rasa tanggung jawab yang tertanam itulah diperlihatkan pegawai BPKAD dalam menentukan fasilitas yang akan direncanakan dengan melihat langsung lapangan dan medan yang ada. Pengklasifikasian: seluruh pengklasifikasian yang dilakukan BPKAD Kota Palu masih terdapat kekurangan setelah bencana tsunami. Pembagian Tugas: bahwa pembagian tugas yang dilakukan BPKAD dalam hal pengelolaan aset tentunya sudah berjalan dengan baik. Ketiga yaitu Pelaksanaan (*actuating*) yang terdapat didalamnya adalah kemampuan *leadership* (kepemimpinan): bahwa kemampuan kepemimpinan yang diambil oleh plt. kepala BPKAD Kota Palu sudah sangat baik karena sering membaur dengan pegawai berada dibawah naungannya dan memperhatikan setiap keperluan terkait peningkatan pengelolaan aset dan fasilitas penunjang kinerja. Keempat adalah Pengawasan (*controlling*) yang di dalamnya terdapat beberapa item yaitu menentukan standar: dalam menentukan standar dalam pengelolaan aset yang di BPKAD Kota Palu mengambil sesuai dengan anggaran yang telah mereka tentukan. Mengukur Hasil Kerja: di BPKAD Kota Palu sudah bekerja di dalam pengelolaan aset dengan maksimal sesuai kapasitas dan kemampuan mereka untuk meningkatkan pengelolaan aset. Perbandingan Presentasi : perbandingan kinerja dapat diambil sampel melalui sertifikasi aset daerah yang masih rendah dikarenakan dalam proses pengelolaan aset saat sekarang di masih banyak kekurangan setelah bencana tsunami yang melanda Kota Palu. Evaluasi : pengelolaan aset BPKAD Kota Palu setiap melakukan giat tentunya ada evaluasi dan dilakukan evaluasinya dengan pemimpin instansi tersebut.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Hal yang menjadi faktor pendukung pada Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu

Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya: Sarana prasarana, Lingkungan Kerja, Kepemimpinan. Sedangkan, hal yang menjadi faktor penghambat pada Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya : Anggaran Pelatihan/BIMTEK, Ketersediaan SDM

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Pasca Bencana Tsunami Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Terdapat 2 upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat yaitu Upaya langsung yang didalamnya terdapat Penambahan Anggaran, Penambahan Jumlah SDM. Sedangkan, Upaya tidak langsung : Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) Melakukan Pelatihan dan Bimbingan Secara Mandiri

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa pada penelitian ini penulis melaksanakan manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca benca tsunami di kantor BPKAD Kota Palu. Dapat menerapkan manajemen untuk pengelolaan aset dengan melihat langsung bagaimana kinerja dalam pengelolaan aset yang dilakukan para pegawai dalam mendata dan meninjau langsung ke lapangan untuk melihat aset.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yang sangat berpengaruhnya dalam pengelolaan aset yaitu Anggaran Pelatihan/BIMTEK yang tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pegawai dan juga ketersediaan SDM yang masih kurang sehingga beberapa pegawai yang dibantu THL yang berada di BPKAD Kota Palu biasanya melakukan pekerjaannya ditambah dengan pekerjaan dari bidang lain.

IV. KESIMPULAN

Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sudah berjalan lancar dan baik, tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya faktor pendukung yang selalu membantu demi kelancaran proses kerja yaitu sarana prasaran yang memadai, lingkungan kerja yang kondusif serta

kepemimpinan yang dipimpin seorang pimpinan yang sangat bisa memotivasi para pegawai, tetapi masih terdapat juga hambatan yang ditemukan yaitu masih kurangnya anggaran pelatihan/BIMTEK dan ketersediaan SDM. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Pasca Bencana Tsunami Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu dengan melakukan pengajuan untuk penambahan anggaran demi terpenuhi segala kebutuhan dan penambahan jumlah SDM untuk bisa lebih mempercepat proses dalam suatu pekerjaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu saat berada dilapangan. Penelitian juga hanya ini berfokus pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Arah Masa Depan Penelitian(*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar bisa dilakukan penelitian lanjutan terkait lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan aset di Kota Palu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih untuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John. W. 2016. *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi keempat.*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doli D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- George R. Terry. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- George R. Terry. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, Hendrawati. 2020. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Zaidan. 2012. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pres.

SKRIPSI

Tadung, Graceilla Revine. 2020. *Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Dearah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan*

Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
Jakarta: Fakultas Manajemen Pemerintahan
Danantyanti, Siska Aprilia. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang.
Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

